

**EVALUASI PERALIHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PLATFORM BIPA4 KE SIPD
(STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) BANYUWANGI**

SKRIPSI



Oleh :

Muhammad Aldhi Taufikurrahman

NIM : 200502110087

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**EVALUASI PERALIHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PLATFORM BIPA4 KE SIPD
(STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

MUHAMMAD ALDHI TAUFIKURRAHMAN
NIM : 200502110087

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

19/06/24, 19.11

Print Persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN

**Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke
SIPD
(Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Banyuwangi**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Aldhi Taufikurrahman

NIM : 200502110087

Telah Disetujui Pada Tanggal 19 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001

LEMBAR PENGESAHAN

7/3/24, 9:31 AM

Print Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD
(Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD ALDHI TAUFIKURRAHMAN

NIM : 200502110087

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 27 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Eajar Nurdin, M.Ak

NIP. 198310052019031006

2 Anggota Penguji

Sri Andriani, M.Si

NIP. 197503132009122001

3 Sekretaris Penguji

Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aldhi Taufikurrahman

NIM : 200502110087

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Jurusan

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD (Studi Kasus di Bandan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Juni 2024

Hormat Saya,



Muhammad Aldhi Taufikurrahman

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari beberapa orang yang sangat saya sayangi, akhirnya skripsi ini telah dapat X`diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan sangat bangga saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan ridho dan karunianya sehingga skripsi ini dapat dibuat tepat pada waktunya.
2. Orang tua saya Bapak Asmuni Abdu dan Ibu Ulin Maria Ulfa yang telah selalu memberikan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat bertahan hingga saat ini.
3. Dosen pembimbing, Ibu Zuraidah yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Dan orang – orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu – persatu yang selalu menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.

MOTTO

“Tidak ada yang namanya kebetulan, kesempatan datang karena diciptakan. Jadi jangan terus berpangku tangan”

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang akuntansi, khususnya dalam peralihan Sistem Informasi Akuntansi BIPA4 ke SIPD RI.

Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang menjadi panutan dan teladan bagi umat Islam. Dengan petunjuk yang beliau sampaikan, kita berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam kebaikan, termasuk dalam mengelola laporan keuangan sesuai dengan prinsip – prinsip yang diajarkan dalam agama islam.

Semoga penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait Sistem Informasi Akuntansi BIPA4 dan SIPD RI dalam konteks praktik keuangan di organisasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan BPKAD Kabupaten Banyuwangi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Mari kita terus berusaha dan berdoa agar setiap langkah yang kita ambil selalu mendapat ridha dan berkah dari Allah SWT. Semoga penelitian ini menjadi awal dari perjalanan yang panjang dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi Islam di berbagai sektor kehidupan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tanpa arahan dan masukan intelektual dari berbagai sumber, penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Zuraidah selaku dosen pembimbing.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moral dan spiritual.
7. Bapak Cahyanto Hendri Wahyudi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. Bapak Henry Januar, Andika Permana, dan Ibu Tanjung Shinta selaku yang menjadi narasumber di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.
9. Liza yang telah memberikan semangat, bantuan. Dukungan dan doa dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

10. Dan seluruh anggota SBC 2.0 (Ahmad Faishol A, Akbar Riansyah, Alvan Okta K, Naufal Axelle F dan Imanullah Rafi P) yang senantiasa menghibur, menguatkan dan kebersamai hingga usainya skripsi ini disusun oleh peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala keterbatasan yang peneliti miliki, saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan untuk lebih sempurnanya laporan penelitian skripsi ini. Akhir kata, peneliti mengucapkan terimakasih dan besar harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam wawasan dan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
خلاصة	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis.....	13
2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi.....	13
2.2.3 Evaluasi	18
2.2.4 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	19
2.2.5 Platform BIPA4	19
2.2.6 Integrasi	20
2.3 Kerangka Berfikir.....	21
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	25

3.3 Subyek Penelitian	25
3.4 Data dan Jenis Data	25
3.4.1 Data Primer	25
3.4.2 Data Sekunder	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Analisis Data	27
BAB IV	30
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	30
4.1.1 Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banyuwangi	30
4.1.2 Visi dan Misi BPKAD Banyuwangi	31
4.1.3 Struktur Organisasi	32
4.2 Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD Pada BPKAD Banyuwangi	43
4.2.1 Evaluasi Konteks	44
4.2.2 Evaluasi Input	46
4.2.3 Evaluasi Proses	50
4.2.4 Evaluasi Produk	52
BAB V	54
KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
Lampiran :	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Banyuwangi.....	35

ABSTRAK

Muhammad Aldhi Taufikurrahman, 2024. Skripsi.

Judul: “Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi BIPA4 ke SIPD (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi”

Pembimbing : Zuraidah, M.S.A

Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Informasi Akuntansi, BIPA4, SIPD

Peralihan sistem informasi akuntansi merupakan keputusan strategis yang tidak dapat diambil secara sepihak. Oleh karena itu, BPKAD Banyuwangi perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa peralihan ke SIPD dapat dilakukan dengan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan. Evaluasi yang matang harus melibatkan aspek-aspek teknis, organisasi, dan keuangan dalam rangka menilai kelayakan dan keberlanjutan implementasi peralihan sistem informasi ini. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan integrasi informasi Pemerintah Daerah yang terhubung satu sama lain untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian BPKAD Kabupaten Banyuwangi masih belum sepenuhnya dapat merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi SIPD. Pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya mampu memanfaatkan SIPD RI untuk modul penganggaran. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai hambatan teknis yang terkait dengan SIPD RI, sehingga menghambat kelanjutan proses penatausahaan dan akuntansi di lingkup tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi tetap menggunakan BIPA4 sebagai solusi alternatif guna melanjutkan proses penatausahaan keuangan daerah hingga tahap pertanggungjawaban. Hingga saat ini pada tahun 2024 peralihan sistem informasi akuntansi platform BIPA4 ke SIPD masih berjalan belum sepenuhnya beralih ke SIPD.

ABSTRACT

Muhammad Aldhi Taufikurrahman, 2024. THESIS.

Title : “System Transition Evaluation Of The Accounting Informastion From Platform BIPA4 to SIPD (Case Study of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Banyuwangi”

Advisor : Zuraidah, M.S.A

Keywords : Evaluation, Accounting Information System, BIPA4, SIPD

Switching accounting information systems is a strategic decision that cannot be taken unilaterally. Therefore, BPKAD Banyuwangi must conduct a thorough evaluation to ensure that the transition to SIPD can be carried out smoothly and that the expected benefits are provided. A thorough evaluation must involve technical, organizational, and financial aspects to assess the feasibility and sustainability of implementing this information system transition. The Regional Government Information System, abbreviated as SIPD, integrates Regional Government information that is connected to support the implementation of regional development. The method used in this research is qualitative, with a descriptive approach, which involves conducting interviews and observations. This research found that The Banyuwangi Regency BPKAD still needs to show the full benefits of using the SIPD application. Over a period from 2020 to 2023, the Banyuwangi Regency Government is only able to utilize SIPD RI for the budgeting module. This limitation is caused by various technical obstacles related to SIPD RI, thus hampering the continuation of that scope's administration and accounting process. Consequently, the Banyuwangi Regency Government continues to use BIPA4 as an alternative solution to continue the regional financial administration process up to the accountability stage. In 2024, the transition from the BIPA4 platform accounting information system to SIPD is ongoing and has yet to be fully converted to SIPD.

خلاصة

محمد الدحي توفيق الرحمن، 2024. أطروحة

دراسة حالة لوكالة إدارة المالية والأصول (SIPD إلى BIPA4 العنوان " :تقييم انتقال نظام المعلومات المحاسبية (BPKAD) الإقليمية في منطقة بانيووانجي

M.S.A، المشرف: زريدة

SIPD، BIPA4، الكلمات المفتاحية: التقييم، نظام المعلومات المحاسبية

BPKAD يعد تبديل أنظمة المعلومات المحاسبية قرارًا استراتيجيًا لا يمكن اتخاذه من جانب واحد. لذلك، يحتاج بسلاسة وتوفير الفوائد المتوقعة. SIPD إلى إجراء تقييم شامل لضمان إمكانية تنفيذ الانتقال إلى Banyuwangi يجب أن يشمل التقييم الشامل الجوانب الفنية والتنظيمية والمالية من أجل تقييم جدوى واستدامة تنفيذ هذا هو عبارة عن تكامل، SIPD التحول في نظام المعلومات. نظام معلومات الحكومة الإقليمية، والمختصر فيما بعد ب لمعلومات الحكومة الإقليمية المرتبطة ببعضها البعض لدعم تنفيذ التنمية الإقليمية. تستخدم تقنية تحليل Banyuwangi Re- البيانات المنهج الوصفي النوعي من خلال إجراء المقابلات والملاحظات. لا تزال نتائج بحث بشكل كامل. في الفترة من 2020 إلى 2023، SIPD غير قادرة على تجربة فوائد استخدام تطبيق BPKAD Re- لوحدة الميزانية. يحدث هذا القيد بسبب عقبات SIPD RI لا تستطيع حكومة منطقة بانيووانجي سوى استخدام مما يعيق استمرار عملية الإدارة والمحاسبة في هذا النطاق. ولذلك، تواصل، SIPD RI فنية مختلفة تتعلق ب كحل بديل لمواصلة عملية الإدارة المالية الإقليمية حتى مرحلة BIPA4 حكومة منطقة بانيووانجي استخدام SIPD إلى BIPA4 المساءلة. حتى الآن، في عام 2024، لا يزال التحول من نظام المعلومات المحاسبية لمنصة SIPD. مستمرًا، ولم يتم تحويله بالكامل بعد إلى

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam periode digital kala ini, penerapan sistem informasi akuntansi telah menjadi elemen krusial dari proses pengelolaan aset dan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi yakni satu elemen di antara lembaga pemerintah daerah yang juga mengadopsi sistem informasi akuntansi. BPKAD Banyuwangi telah menggunakan platform BIPA4 sebagai sistem informasi akuntansi guna melipatgandakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, perkembangan teknologi yang cepat dan tuntutan perubahan kebijakan dan peraturan mendorong kebutuhan akan sistem informasi yang lebih baru dan canggih. Peralihan dari platform BIPA4 ke sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD) adalah salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BPKAD Banyuwangi.

Peralihan sistem informasi akuntansi merupakan keputusan strategis yang tidak dapat diambil secara sepihak. Oleh karena itu, BPKAD Banyuwangi perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa peralihan ke SIPD dapat dilakukan dengan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan. Evaluasi yang matang harus melibatkan aspek-aspek teknis, organisasi, dan keuangan dalam rangka menilai kelayakan dan keberlanjutan implementasi peralihan sistem informasi ini.

Dalam pelaporan yang dibuat, pengurusan keuangan wajib tepat dengan peraturan perundang-undangan yang teraplikasi. Peningkatan program pembangunan di seluruh domain seolah menjadi cara terbaik untuk menyuarakan sebuah informasi dan mengerahkan banyak orang secara luas dengan teknologi digital adalah ekspektasi untuk pengadministrasian pemerintahan daerah saat ini dan masa depan. Sistem akuntansi pemerintahan memiliki eksistensi pelaporan dan eksistensi akuntansi yang bertanggung jawab untuk menjalankan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Pada akhir periode, administrasi keuangan daerah menciptakan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), yang menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dan publik. Laporan keuangan terdapat beberapa varian, contohnya Neraca, LRA, LO, LAK, LPSAL, LPE, dan CaLK, yang disediakan sejalan dengan patokan akuntansi pemerintah. Di domain publik, kualitas informasi akuntansi mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Beshi & Kaur, 2020).

Bagaimana sebuah perusahaan memenuhi misinya dan berkembang untuk mencapainya menentukan keberhasilannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem informasi akuntansi yang kuat dibutuhkan. Sebab itu, sistem informasi akuntansi BIPA4 berguna menyokong dalam membuat laporan keuangan. Pada tahun 2020, laporan keuangan Pemerintah Daerah Pemkab Banyuwangi telah menggunakan platform informasi akuntansi BIPA4 dan disusun berdasarkan basis akuntansi akrual.

Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang dapat disingkat atau dikenal dengan SIPD, berfungsi untuk mengelola data yang saling terhubung tentang pembangunan, keuangan, dan data pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam operasi pembangunan daerah. Melipatgandakan kuantitas dan ragam prospek karir yang ada untuk populasi di daerah tersebut adalah tujuan utama dari setiap upaya pembangunan ekonomi daerah. Sebab itu, Pemerintah daerah dan populasi daerah tersebut wajib bersinergi guna mencapai tujuan ini.

Dalam hal keuangan di kantor BPKAD Banyuwangi, respektif pengelolaan keuangan pada tiap SKPD bertanggung jawab atas proses penyusunan anggaran, penatausahaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan saat ini BPKAD Banyuwangi disokong dengan aplikasi, yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai aplikasi utamanya dan BIPA4 yang digunakan BPKAD sebagai aplikasi pembantu.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, atas pengelolaan sumber daya yang dipunya serta bentuk pertanggungjawaban keuangan atas Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu tahun anggaran. Pembentukan LKPD juga merupakan bentuk keterbukaan atau transparansi dalam pembinaan keuangan selayaknya diamanatkan oleh undang-undang seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Binaan pemerintahan daerah, spesifiknya yakni BPKAD merupakan eksistensi akuntansi yang memiliki keharusan menjalani pengarsipan atas transaksi *outcome*, belanja, serta aset yang terjadi pada lingkungan SKPD. Sistem akuntansi keuangan yang akuntabel dan pengawasan yang teratur bisa mempengaruhi laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah yang dibuat menggunakan patokan akuntansi pemerintah adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa pemerintah mengelola keuangan dengan baik. Penggunaan sistem informasi, khususnya di lembaga pemerintah, sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang terorganisir. Informasi statistik pengelolaan keuangan daerah dan statistik terkait lainnya didokumentasikan, diawasi, dan diproses menjadi materi yang dipresentasikan kepada masyarakat. Sistem informasi keuangan daerah juga dimanfaatkan sebagai alat pemungutan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. BPKAD Kabupaten Banyuwangi mengalami perubahan dalam sistem informasi yang dimanfaatkan, yang mana BIPA4 sebagai aplikasi utama yang digunakan BPKAD saat ini diganti dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pemindehan data dari BIPA4 ke SIPD tetap dilakukan untuk tetap menjaga konsistensi dan integrasi data antara berbagai sistem informasi yang digunakan dalam pemerintahan daerah.

Penelitian ini memiliki varian keterbaruan yang bisa menyuguhkan partisipasi signifikan pada bidang pengelolaan sistem informasi akuntansi pada konteks pemerintahan daerah, khususnya dalam peralihan sistem informasi akuntansi dari platform BIPA4 ke SIPD di BPKAD Banyuwangi. Penelitian ini memanfaatkan studi kasus yang menitikberatkan pada BPKAD Banyuwangi sebagai obyek penelitian. Dengan memilih BPKAD Banyuwangi sebagai studi kasus, penelitian ini bisa memberikan pemahaman tentang peralihan sistem informasi akuntansi di tingkat daerah, sehingga hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi institusi serupa dalam menghadapi tantangan serupa. Hal ini memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang proses peralihan sistem informasi akuntansi yang kompleks di lingkungan pemerintahan daerah, serta risiko dan manfaat yang terkait. Penelitian ini melibatkan evaluasi terkait peralihan sistem informasi akuntansi. Selain melihat aspek teknis, penelitian ini juga akan mengevaluasi aspek organisasi dan keuangan. Pendekatan evaluasi yang komprehensif ini hendak menciptakan ilustrasi yang lebih lengkap mengenai kelayakan dan keberlanjutan peralihan sistem informasi akuntansi ini.

Dalam hal pelaporan keuangan teknologi dapat membantu instansi untuk menginput dan menyusun transaksi keuangan. Dalam konteks ini, penelitian ini menargetkan guna membahas dan mengevaluasi mutasi sistem informasi akuntansi dari platform BIPA4 ke SIPD di BPKAD Banyuwangi. Dengan menyelidiki dan menganalisis peralihan ini, diharapkan penelitian ini bisa menghibahkan wawasan lebih fokus terhadap tantangan, manfaat, risiko, dan

peluang yang terpaut dengan peralihan sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga diperkirakan bisa menyumbangkan rekomendasi yang konkrit dan berdasarkan analisis mendalam guna penyempurnaan implementasi peralihan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks latar belakang yang selesai dipaparkan, berikut rumusan masalah yang akan diformulasikan yakni :

Bagaimana evaluasi peralihan sistem informasi akuntansi platform BIPA4 ke SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan diformulasikan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

Mengevaluasi peralihan sistem informasi akuntansi platform BIPA4 ke SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Harapannya melalui penelitian ini, bisa menciptakan implikasi positif yang signifikan bagi khasanah ilmu pengetahuan umumnya mengenai sistem informasi akuntansi, platform BIPA4 dan peralihan sistem informasi platform BIPA4 ke SIPD di BPKAD Banyuwangi.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Mahasiswa

Harapannya melalui penelitian ini, bisa mempertinggi pemahaman tentang sistem informasi akuntansi dan menjadi dasar guna penelitian berikutnya.

- Bagi Peneliti

Mampu meningkatkan keterampilan dan kreativitas berpikir, memperdalam dan meningkatkan pemahaman teori yang telah diperoleh pada jenjang perkuliahan, dan dapat memecahkan masalah yang terkait dengan isu yang diambil.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Guna mencapai insight lebih spesifik mengenai masalah yang akan dibahas, selain mengutip dan membahas teori-teori yang relevan, penting juga untuk mengkaji penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, diselenggarakan telaah terhadap studi-studi terdahulu yang relevan dengan implementasi sistem informasi akuntansi platform BIPA4 apakah selaras dengan patokan akuntansi pemerintah (SAP). Hasil pengkajian tersebut disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Variabel dan Metode/analisis data	Hasil penelitian
1.	Rahma Firdauz Hazmy (2023)	Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung	Sistem Informasi Akuntansi (Kualitatif)	Di Rumah Sakit Muhammadiyah Kecamatan Bandung, Tulungagung, kesalahan penanggungjawab telah dikurangi dengan penggunaan sistem komputerisasi untuk Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan.

2.	Apriliano Yusuf Hidayat (2023)	Evaluasi Sistem Penjualan Untuk Menunjang Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pengendalian Internal Pada CV Gondix Plastik Kesamben Blitar	Sistem Informasi Akuntansi (Kualitatif)	Sistem Informasi Akuntansi Penjualan CV. Gondix Plastic Kesamben Blitar memakai sistem prosedur tidak otomatis dan terdigitalisasi atau semi-terdigitalisasi. Tetapi, sistem ini sering mengalami kesalahan saat menjalankan sistem.
3.	Zahrotul Lailiyah (2023)	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada MI Roudlotul Islamiyah Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo	Sistem Informasi Akuntansi (Kualitatif)	Berdasarkan evaluasi dan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa MI Roudlotul Islamiyah Sawocangkring Wonoayu terintegrasi dengan sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengatur manajemen dana BOS. Eksekusi sistem ini sudah terbukti beroperasi dengan mulus, seperti yang ditunjukkan oleh laporan yang dibuat setiap waktu.
4.	Muhammad Irfan Nasution, Nurwani (2021)	Analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada BPKAD Kota Medan	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Kualitatif)	Mengacu pada hasil riset yang telah dilaksanakan studi mengindikasikan bahwa BPKAD

				kota Medan sudah memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna membuat regulasi untuk varian program pemerintah kota.
5.	Ira Gustina (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Kuantitatif)	Hasil pengujian hipotesa masing-masing menunjukkan bahwa ada hubungan antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan H2 diterima. <i>Outcome</i> ini mengindikasikan bahwa tingkat penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang lebih tinggi menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.
6.	Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap	Sistem Informasi Akuntansi (Kuantitatif)	Pemakaian sistem informasi akuntansi meningkatkan mutu laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Badung. Ini mengindikasikan

		Kualitas Laporan Keuangan.		bahwa rentang penggunaan sistem informasi akuntansi yang lebih unggul sebanding dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
7.	Lailatur Rohmah, Noor Shodiq Askandar, Arista Fauzi Kartika Sari (2020)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang	Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (Kuantitatif)	Sebagian, pengeksploitasian sistem informasi akuntansi keuangan daerah berdampak positif pada mutu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa SKPD yang dapat mengaplikasikan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan secepat kilat, aman, dan menghasilkan hasil yang baik dapat melaksanakan pekerjaan dan kewajiban yang diberikan kepada mereka guna merangkai laporan keuangan yang baik juga.
8.	Muhammad Iqra Harun (2020)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi	Sistem Informasi Akuntansi (Kuantitatif)	Hasil riset mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan

		Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat terdampak oleh faktor penggunaan sistem informasi akuntansi.
9.	Septony B. Siahaan dan Arthur Simanjuntak (2020)	Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BPKAD Kabupaten Labuhan Batu Utara)	Sistem Informasi Keuangan Daerah (Asosiatif Kasual)	Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah beimplikasi menguntungkan dan bermakna besar atas mutu laporan keuangan
10.	Ismet Sulila (2019)	The Effect of Human Resource Competency and Implementation of SIMDA on the Quality of Financial Statement at BPKAD Office	Penerapan SIMDA (Kuantitatif)	Pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA KEUANGAN) berdampak besar atas mutu laporan keuangan pada kantor BPKAD Kota Gorontalo.

		of Gorontalo City		
--	--	----------------------	--	--

Perbedaan antara riset terdahulu dan riset saat ini. Terdapat perubahan lingkup masalah yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu pada riset ini menguji peralihan sistem informasi akuntansi platform BIPA4 ke SIPD untuk menyusun laporan keuangan di BPKAD Banyuwangi yang belum dievaluasi sebelumnya dan digunakan peneliti sebelumnya.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi yakni rangkaian terintegrasi yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, menampung, dan mengirimkan data guna membantu proses pemungutan keputusan dan pemantauan perusahaan (Laudon, 2000). Terdapat 5 (lima) siklus dalam sistem informasi akuntansi (James A Hall., 2010) yakni :

1. Siklus pendapatan

Dalam siklus transaksi ini, penjualan dan penerimaan dilakukan secara fungsional. Siklus pendapatan adalah instruksi pendapatan yang diawali dengan otorisasi kredit untuk menjual barang, mengambil barang, menerima barang, dan menagih uang sampai diterima.

2. Siklus pengeluaran

Siklus pengeluaran termasuk pembelian dan pembayaran dengan uang tunai. Siklus pengeluaran diperlukan bagi setiap bisnis karena memastikan barang dan jasa yang dipesan sejalan dengan kebutuhan,

barang diterima dalam kondisi baik, dan pengeluaran secara keseluruhan kas sesuai melalui batas pengeluaran yang diizinkan.

3. Siklus penggajian

Siklus ini mencakup kegiatan merangkai kontrak dan memberikan upah pegawai.

4. Siklus produksi

Memodifikasikan bahan mentah dan tenaga kerja menjadi produk jadi adalah bagian dari siklus produksi. Empat langkah utama dalam siklus ini adalah konseptualisasi produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya.

5. Siklus keuangan

Untuk memperoleh profit dari investor dan kreditor serta melunasi pembayaran mereka kembali, siklus ini mencakup pelaporan keuangan, yang mencakup pencatatan, perekaman, dan pemformatan laporan keuangan berdasarkan data yang terdapat dari buku besar.

2.2.2 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Selama proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, BPKAD menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif teknologi sistem informasi bagi pengguna (Meuthia, 2008 dalam Gusforni, 2011):

1. Penerapan teknologi bisa memacu performa pemakai.
2. Penerapan teknologi bisa mengunggulkan kinerja pemakai.

3. Penerapan teknologi bisa mendorong skala pencapaian prosedur yang dijalankan pemakai.

Menurut Afiah (2008), perspektif mengenai pemakai teknologi informasi tercakup sebagai berikut : (1) tingkat kecepatan, (2) tingkat keamanan, dan (3) tingkat mutu hasil. Data yang telah diformat menjadi bentuk secara bermakna bagi penggunaannya adalah tujuan sistem informasi. Data yang tidak diolah tidak dianggap sebagai informasi. Agar data berguna, data harus akurat kepada orangnya, akurat waktu, dan akurat nilai. Selain itu, hal-hal yang tidak diperkuat oleh tiga pilar ini bukan informasi yang berfaedah, tetapi hanya sampah. Kemudian, (Fitrios, 2019) Sistem informasi akuntansi yakni sekumpulan sumber daya, termasuk manusia dan perkakas, yang berinteraksi satu sama lain untuk memodifikasi data keuangan dan non - keuangan jadi informasi akuntansi.

Di dalam Platform BIPA4 yang digunakan oleh BPKAD Banyuwangi terdiri dari Modul Administrator, setup, Planning & Budgeting, Penatausahaan, Perubahan, Akuntansi dan Simpada NON SKP.

1. Modul Administrator

Modul administrator digunakan oleh pengguna tertentu yang mempunyai akses khusus, seperti administrator sistem atau administrasi aplikasi untuk melakukan tugas-tugas seperti :

- a. Mengelola Pengguna
- b. Mengkonfigurasi pengaturan
- c. Mengawasi keamanan dan

d. Melakukan tindakan administratif lainnya sesuai dengan kebutuhan sistem.

2. Modul Setup

Modul setup adalah bagian dari platform yang dirancang untuk mengkonfigurasi dan mengatur pengaturan dasar atau awal. Modul ini membantu para pengguna dalam membuat konfigurasi awal yang diperlukan untuk memastikan platform bisa berperan dengan baik dan bekerja sejalan dengan ekspektasi.

3. Modul Planning & Budgeting

Modul Planning mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan membantu pemerintah daerah menata Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kerangka ekonomi daerah, keutamaan pembangunan dan komitmen, rencana kerja terukur, dan biru keuangan baik dari pemerintah, pemerintah daerah, atau kemitraan masyarakat serta ekuitas diberikan oleh RKPD. Sementara modul budgeting membantu pemerintah mengatur anggaran, sebagai berikut :

- a. RKA-SKPD, RKA-PPKD, dan RKA-Unit Kerja
- b. Perda tentang APBD
- c. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- d. Perda tentang perubahan APBD
- e. Pergeseran Anggaran
- f. Anggaran Kas

g. Surat Penyediaan Dana (SPD)

4. Modul Penatausahaan

Modul penatausahaan menyokong pemerintah daerah dalam mengaplikasikan APBD serta penerapan penatausahaan bendahara. Ruang lingkup modul ini ialah berikut ini:

- a. Penatausahaan Penerimaan
- b. Penatausahaan Pengeluaran
- c. Penatausahaan yang mendahului perubahan APBD
- d. Penatausahaan BUD termasuk pengelolaan Kas Daerah.

5. Modul Perubahan

Modul perubahan apabila RKPD yang ditetapkan oleh peraturan bupati, digunakan untuk menilai konsep Peraturan Daerah tentang APBD guna memverifikasikan bahwa APBD diformat berdasarkan RKPD. Jika RKPD tidak sesuai dengan perubahan yang terjadi selama tahun berjalan, maka RKPD dapat diubah.

6. Modul Akuntansi

Modul akuntansi menjurnal serta membuat rencana dan menerapkan kebijakan teknis akuntansi, membuat laporan bulanan, triwulan, dan semesteran, serta laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. Pengadaan barang dan jasa juga termasuk strategi, evaluasi kebutuhan, alokasi dana, akusisi, penerimaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, bisnis, pemanfaatan, perawatan, keamanan, penaksiran, eliminasi, pemindah tanganan, pelatihan, monitoring, pembiayaan dan kompensasi

serta mengkoordinasikan pengelolaan aset daerah pada masing-masing unit kerja entitas daerah.

7. Modul Simpada NON SKP

Modul Simpada NON SKP yakni sistem yang dimanfaatkan guna mengelola dan menyunting informasi yang tidak terpaut dengan SKP. Informasi ini diterima dari berbagai sumber, diproses melalui validasi dan verifikasi, dan akhirnya digunakan untuk membuat laporan yang dapat digunakan oleh instansi untuk berbagai keperluan.

2.2.3 Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang mengharuskan seseorang memanfaatkan pikiran kreatif guna mengatasi masalah, menemukan inovasi, dan mencapai kinerja terbaik. Menurut (Basir, 1996) Evaluasi adalah pendekatan deskriptif dalam penelitian data, informatif, dan antisipatif yang dilakukan dengan sistematis dan bertahap guna menetapkan kebijaksanaan pada upaya peningkatan pendidikan. Dengan demikian, evaluasi bisa didefinisikan sebagai proses guna memecahkan masalah dengan mengakumulasikan data, baik teori atau fakta, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat tentang cara memecahkan masalah.

Merujuk kepada Collier, Paul, Dixon (1995) ada prosedur – prosedur saat melaksanakan audit sistem yakni:

1. Memverifikasi dan pengarsipan laporan yang diciptakan oleh tiap departemen di perusahaan.
2. Mengoleksi opini pengguna bagai umpan balik untuk peningkatan ataupun elemen lain melalui informasi.

3. Mendiskusikan apapun yang ditemukan oleh para pimpinan senior yang berkaitan dan pihak IT bagai perantara informasi.
4. Melakukan penilaian sistem yang dimanfaatkan.
5. Menginspeksi sistem yang dimanfaatkan oleh MIS guna memastikan kebutuhan berkelanjutan terhadap laporan yang tersedia.
6. Melakukan pembahasan hasil inovasi dengan pimpinan yang terkait dari MIS dan menyajikan saran yang tepat bagi perusahaan.

2.2.4 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dengan nama lain SIPD, merupakan sistem informasi yang mengatasi pembinaan dan pemantauan pemerintahan daerah, keuangan, dan perencanaan pembangunan. Selain itu, SIPD berguna bagai jaringan untuk penghimpunan data yang efektif dan secepat kilat dengan memanfaatkan teknologi informasi; membantu dalam perangkaian program dan kegiatan; dan melakukan tinjauan pembangunan daerah secara munasabah, efisien, dan efektif. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Serta Sosialisasi Perpres No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

2.2.5 Platform BIPA4

Banyuwangi *Integrated Planning, Accrual, Accounting and Asset Application* (BIPA4). BIPA4 digunakan untuk mengorganisir data dan informasi yang tercakup pada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Data ini kemudian diintegrasikan ke dalam SIPD, yang terhubung dari tingkat pusat hingga daerah, untuk mendukung penataan dokumen strategi pembangunan daerah. Data dan infor-

masi yang tersedia dalam BIPA4 sangat berguna sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang mendukung perencanaan dan pembangunan daerah. Di dalam BIPA4 terdapat daftar yang bisa memfasilitasikan bendahara dalam mengelola penerimaan maupun pengeluaran guna mengoptimalkan penerimaan dan pengeluaran yang diorganisasikannya. Platform BIPA4 terdiri dari Modul Administrator, Setup, Planning & Budgeting, Penatausahaan, Perubahan, Akuntansi dan Simpada NON SKP. BIPA4 digunakan mulai tahun 2014 sampai tahun 2023 digunakan hanya untuk aplikasi pembantu.

2.2.6 Integrasi

Pesan Allah SWT pada Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 282 dengan penerjemahan berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَدَاءُ
 إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Bila anda melaksanakan utang piutang pada rentan waktu yang ditetapkan, Sebaiknya anda mencatatnya. Dan sebaiknya pribadi penulis di antara anda mencatatkannya secara tepat. Janganlah penulis menyangkal untuk mencatatkannya sama seperti Allah sudah men- didik kepadanya, sebab itu sebaiknya mereka mencatatkannya. Dan sebaiknya seseorang yang berhutang itu meminta, dan sebaiknya dia bertakwa kepada Al- lah, Tuhannya, dan janganlah dia memangkas sedikit pun daripada dia. Bila yang berutang itu seseorang yang kurang akan akal nya atau rapuh (keadaannya), atau tidak mampu meminta sendiri, sebab itu sebaiknya walinya meminta dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Bila tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, sebab itu (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang

ada), supaya bila yang seorang lupa, sebab itu yang seorang lagi memperingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu menyangkal bila dipanggil. Dan janganlah anda jenuh mencatatnya, guna ambang rentan waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Segala sesuatu, lebih adil di sisi Allah, lebih bisa menyakinkan kesaksian, dan lebih mendekatkan anda pada kepastian, kecuali bila aspek tersebut yakni perdagangan tunai yang anda jalankan di antara anda, sebab itu tidak ada dosa untuk anda bila anda tidak mencatatnya. Dan pilihlah saksi bila anda berjual beli, dan janganlah penulis diperumit dan sama halnya saksi. Bila anda jalankan (aspek tersebut), sebab itu sungguh, aspek tersebut suatu kefasikan kepada anda. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah menyuguhkan pembelajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui keseluruhan. “

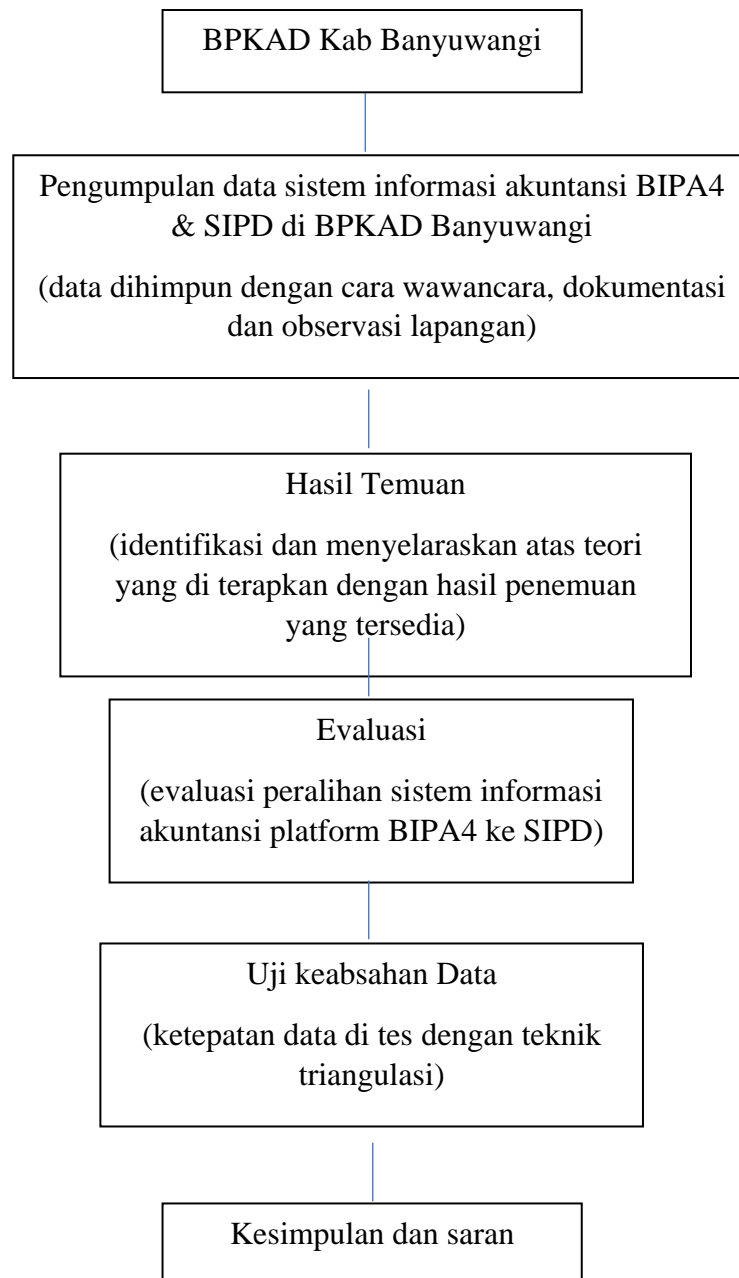
Ayat itu memuat firman Allah SWT yang menguraikan mengenai pentingnya apabila mengoperasikan utang piutang (bertransaksi) dalam rentan waktu yang ditetapkan, disarankan untuk anda mencatat (mengarsipkan dan membukukannya).

2.3 Kerangka Berfikir

Riset ini dengan maksud guna membahas dan mengevaluasi peralihan sistem informasi akuntansi dari platform BIPA4 ke SIPD di BPKAD Banyuwangi. Dengan menyelidiki dan menganalisis peralihan ini, diharapkan riset tersebut bisa menyuguhkan wawasan lebih detail tentang tantangan, manfaat, risiko, dan peluang yang sehubungan dengan peralihan sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah daerah. Di dalam tahapan tatakelola keuangan dan barang milik daerah di BPKAD Banyuwangi, menggunakan sebuah sistem teknologi informasi yang mengolah dan menyatukan seluruh proses pengelolaan keuangan. Memperoleh informasi yang cepat dan tepat merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi. Pada proses pengaplikasian sistem informasi akuntansi pada sebuah instansi pemerintahan, sering terjadi perubahan pada sistem informasi akuntansi yang dimanfaatkan serta mungkin masalah yang terjadi karena adanya

perubahan tersebut, begitupun sistem informasi akuntansi pada BPKAD Banyuwangi. Saat ini terjadi peralihan penggunaan sistem informasi pada BPKAD Banyuwangi dimana sebelumnya menggunakan BIPA4 sebagai aplikasi utama yang digunakan sekarang aplikasi utama yang digunakan adalah SIPD, masalah atau perubahan dapat terjadi saat peralihan sistem berlangsung.

Dengan menyelidiki dan menganalisis peralihan ini, diharapkan riset tersebut bisa menyajikan wawasan lebih detail dan rinci tentang tantangan, manfaat, risiko, dan peluang yang sehubungan dengan peralihan sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah daerah. *Output* analisis dan penilaian peralihan sistem informasi akuntansi bisa berwujud masalah serta beberapa modul pada BIPA4 yang masih digunakan atau sudah tidak digunakan oleh BPKAD Banyuwangi.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dimanfaatkan guna mengamati objek penelitian secara alamiah, posisi peran peneliti menjadi instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sebagai salah satu metode analisis untuk memastikan keabsahan data. Selanjutnya, analisis data dijalankan dengan penalaran induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih berfokus kepada pemahaman konteks khusus daripada umumnya yang lebih luas (Abdussamad, 2021).

Data yang dikumpulkan berasal dari platform yang digunakan oleh BPKAD Banyuwangi yaitu platform BIPA4 <https://BIPA4.banyuwangikab.go.id/>. Data berisi laporan keuangan yang diciptakan oleh BPKAD Banyuwangi. Pada data itu bisa dilihat rincian dari laporan keuangan BPKAD Banyuwangi yang kemudian dianalisis laporan keuangan tersebut. Data yang dikumpulkan juga dari SIPD.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yakni pendekatan kualitatif. Jenis riset yang dilaksanakan bersifat deskriptif kualitatif dengan analisa antara teori yang relevan dengan penerapan pada Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD)) Banyuwangi.

3.2 Lokasi Penelitian

Obyek riset yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kab Banyuwangi yang berada di Jl. Adi Sucipto No.28, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 8 Tahun 2016, BPKAD Kabupaten Banyuwangi dibentuk untuk melakukan peran penopang dalam manajemen keuangan pemerintahan.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian yakni komponen krusial posisinya dalam suatu riset, subyek penelitian wajib direncanakan sebelum peneliti siap guna menghimpun data (Arikunto dalam Halim, 2015: 41). Subyek penelitian bisa berwujud hal, orang, atau benda. Pernyataan tersebut dapat dikonklusikan bahwa subyek penelitian pada umumnya manusia atau sesuatu apapun yang menjadi urusan resmi manusia. Subyek penelitian yang dimanfaatkan pada penelitian yakni BPKAD Kab Banyuwangi.

3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data kualitatif yang dimanfaatkan pada penelitian tersebut diantaranya :

3.4.1 Data Primer

Data primer, juga dikenal sebagai data asli yang *up to date* atau masih baru, adalah data orisinal yang ditemukan langsung dari narasumber tanpa menggunakan jembatan penghubung. Data primer bisa berwujud opini individu

atau kelompok subjek, hasil pengamatan terhadap benda (fisik, kejadian, atau kegiatan) dan hasil evaluasi. Peneliti harus mengumpulkan data orisinal dari sumber pertama mereka, yakni dengan menjalankan pengamatan kepada unit yang terkait dengan Platform BIPA4 dan Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Banyuwangi.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yakni basis informasi data turunan yang bisa diakses melalui media perantara, contohnya catatan, bukti, atau rekaman data historis yang terdokumentasikan di arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dimanapun yang berkaitan dengan BPKAD Banyuwangi. Data sekunder juga bisa didapatkan di internet, buku ataupun jurnal. Data sekunder berhasil diperoleh pada penelitian yakni data yang berwujud modul BIPA4.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, observasi, dan bahan dokumenter adalah metode pengumpulan data kualitatif yang paling otonom dibandingkan berbagai varian metode pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data pada riset ini mencakup :

a. Observasi

Observasi yakni cara peneliti memasuki dunia bisnis secara langsung dengan meninjau beberapa peristiwa yang ada dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan kejadian dan catatan adalah observasi yang diaplikasikan oleh peneliti saat menghimpun data. Dalam analisis

dokumen, penelitian memanfaatkan varian dokumen perusahaan sebagai basis informasi untuk mengartikulasikan data.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau penanya. Narasumber dari wawancara adalah salah satu pegawai di bidang akuntansi BPKAD Kab Banyuwangi Tanjung Shinta Yudaningtyas, A.Md. Proses wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan, dan tanya jawab dilakukan dengan menggunakan perangkat rekaman untuk merekam hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Berbeda dengan teknik wawancara yang melibatkan pihak internal BPKAD Banyuwangi secara langsung, dokumentasi dilakukan dengan cara mengamati data, dokumen, serta berkas – berkas milik BPKAD. Laporan keuangan yang dibuat oleh BPKAD serta dokumen lain yang dibutuhkan untuk kebutuhan riset.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penutup dalam pemrosesan data yang didapatkan dari sumber data primer dan sekunder, sehingga riset menjadi tidak rumit dipahami serta ditafsirkan. Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengelompokkan dan mensistematisasikan data yang dikumpulkan dari *output* wawancara, observasi lapangan, dan dokumen. Proses ini menyertakan pengelompokan data ke dalam kategori, pembagian ke beberapa divisi, sintesis,

pengidentifikasian skema, penyeleksian informasi krusial untuk dikaji, serta penarikan konsensus yang dapat dipahami dengan jelas.

Analisis data kualitatif berlangsung selama rentan waktu tertentu, baik berlangsungnya proses pengumpulan data maupun sesudahnya. Selama wawancara, peneliti mengkaji respon orang yang diwawancarai. Jikalau hasilnya kurang memenuhi ekspektasi, peneliti akan mengeksekusi kembali wawancara sampai data menjadi jelas diutarakan oleh Huberman dan Miles (1984) dalam Sugiyono (2018:134). Proses menganalisis data dalam riset seperti :

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, tahap mengumpulkan data dilaksanakan dengan metode observasi, wawancara lebih detail, dan dokumentasi yang biasa disebut dengan gabungan ketiganya (triangulasi).

2. Reduksi

Mereduksi data memiliki arti meringkas, menyeleksi data penting, mengutamakan data yang krusial, dan mencari isu dan skemanya. Data yang sudah direduksi akan menyajikan ilustrasi yang detail, rinci, dan meringankan peneliti dalam pengumpulan data tambahan. Adapun prosedur – prosedur dalam mereduksi data dalam riset tersebut sebagai berikut :

- a. Peneliti berencana untuk mengkaji data yang sudah mereka kumpulkan untuk menetapkan mana yang termasuk hal penting untuk analisis pengolahan data.

- b. Selanjutnya, peneliti berencana memilih data dari wawancara dan observasi, menghapuskan argumen yang tidak sesuai dengan riset.

3. Penyajian Data

Prosedur berikutnya sesudah berhasil mereduksi data yakni menyediakan data. Mengemukakan data membuat lebih mudah untuk menafsir keadaan yang terjadi dan mengatur strategi pekerjaan berikutnya sesuai dengan data yang sudah dimengerti. Penyajian data dalam riset ini mencakup deskripsi sejalan dengan Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD secara lengkap dan sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, prosedur penutup pada analisis data kualitatif yakni penarikan putusan akhir dan validasi. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Penemuan bisa berwujud gambaran atau deskripsi sebuah objek yang sebelumnya tidak pasti menjadi pasti sesudah melakukan penelitian. Jika kesimpulan tidak ditunjang oleh bukti yang menyakinkan, maka kesimpulan itu tidak pasti dan akan bertransformasi. Sebaliknya, jika kesimpulan ditunjang dengan bukti yang menyakinkan atau terverifikasi serta stabil saat peneliti kembali ke lapangan guna mengoleksi data, sebab itu ringkasan yang dibuat menjadi akurat.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banyuwangi

Badan Pengelolaan dan Aset Daerah adalah elemen pendukung Pemerintahan yang menyandang otoritas Daerah Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikomandoi oleh Kepala Badan yang memiliki posisi di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi bertempat di Jl. Adi Sucipto No.28, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Beralaskan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 8 Tahun 2016, BPKAD Kabupaten Banyuwangi dibentuk untuk menjalankan fungsi pendukung urusan pemerintahan sektor keuangan. BPKAD memiliki peran yang sangat krusial pada tatakelola keuangan daerah guna mencapai efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Fungsi utama BPKAD adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan tatakelola keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, semua aktivitas yang berkaitan dengan perancangan, eksekusi, manajemen, pelaporan, akuntabilitas, dan pemantauan keuangan daerah disebut sebagai tatakelola keuangan daerah. Pemerintah menggunakan tatakelola keuangan daerah sebagai pedoman guna memproses keuangan daerah secara optimal dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah. BPKAD juga memiliki peran dalam pengawasan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Mereka memastikan bahwa pengeluaran daerah sejalan dengan strategi yang sudah disusun dan memenuhi patokan peraturan perundang-undangan yang beroperasi. BPKAD melakukan pemantauan terhadap setiap kegiatan yang menggunakan anggaran publik untuk memastikan penggunaannya yang tepat dan efisien. Selanjutnya, BPKAD juga bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah. Mereka mengawasi dan memastikan bahwa aset penting yang diklaim oleh pemerintah daerah dikelola dengan tepat dan tercatat secara akurat. BPKAD juga berperan dalam melaksanakan inventarisasi aset daerah serta mengawasi proses pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan aset tersebut.

4.1.2 Visi dan Misi BPKAD Banyuwangi

1. Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 2023 yakni sebagai berikut :

Terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah.

2. Misi

Misi yakni formulasi umum tentang tindakan yang akan dijalankan untuk merealisasikan visi. Maka dari itu, visi belum bisa disebut sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berguna untuk merealisasikan cita-cita yang di targetkan. Adapun Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 2023 adalah sebagai berikut :

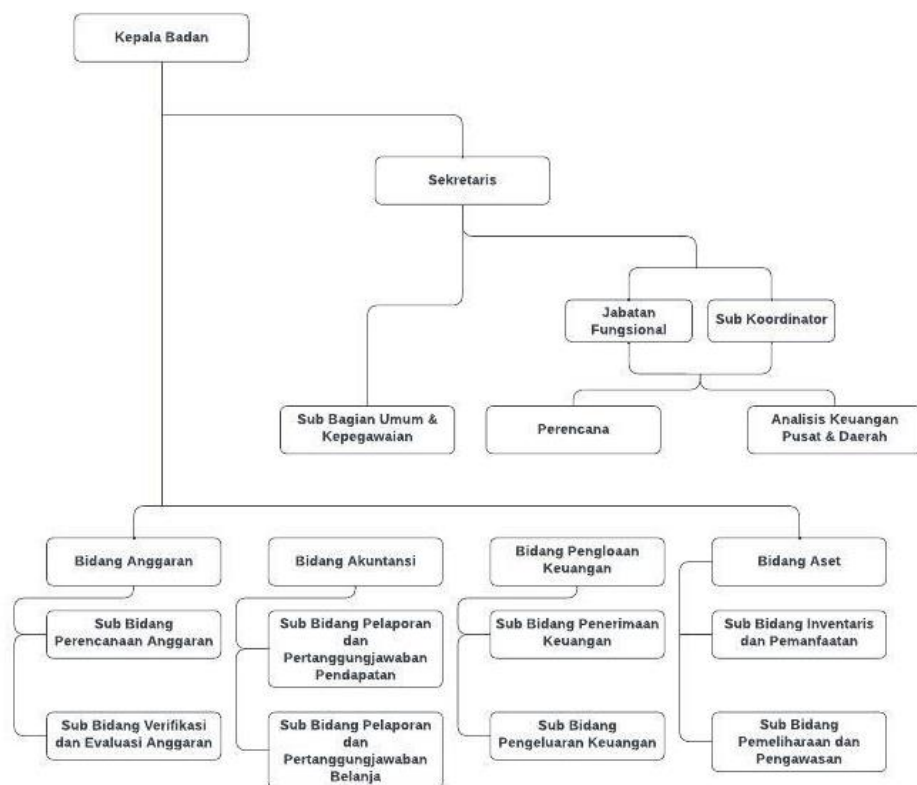
Membangun layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat krusial bagi organisasi karena memungkinkan pembagian tugas sejalan dengan kewajiban dan melakukan penjabaran tugas dengan lebih efisien dan efektif. Karena itu, setiap bagian akan diberi tanggung jawab sejalan dengan fungsi dan peranannya. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi disajikan berikut.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPKAD Banyuwangi



Tugas pada jabatan di struktur organisasi :

a. Kepala Badan

- 1) Koordinasi penerapan program kerja organisasi dengan menyelenggarakan pertemuan rutin dengan seluruh staf untuk melaporkan evaluasi akhir pekerjaan dan mencari solusi masalah;
- 2) Koordinasi dengan Tim Eksekutif dan Legislatif untuk menyusun arah kebijakan umum, rencana, dan prioritas APBD Kabupaten Banyuwangi;
- 3) Mengawasi proses penyusunan APBD, pelaksanaannya, perubahannya, dan legalisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).);
- 4) Koordinasi dan supervisi pembuatan surat permohonan dana, publikasi surat perintah pencairan dana, dan pengolahan proposal pengukuhan pengelola keuangan daerah;
- 5) Mengawasi fungsi bendahara umum daerah, mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dan mengkonfirmasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 6) Koordinasi publikasi surat keterangan tentang penghentian aliran dana, pengambilan, pemotongan, dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan kompensasi atau pengembalian kelebihan pendapatan;
- 7) Koordinasi ketentuan akuntansi keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset milik daerah,

- pembuatan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban atas penerapan APBD, dan penyebaran informasi tentang keuangan dan aset daerah;
- 8) Mengawasi pengembangan dan penerapan administrasi barang milik daerah, pengembangan dan pelaksanaan pemrosesan keuangan SKPD di Kabupaten Banyuwangi, dan melakukan evaluasi skema APBD, skema Perubahan APBD, dan skema pertanggungjawaban penerapan APBD;
 - 9) Memproses tuntutan manajemen keuangan dan tuntutan ganti rugi;
 - 10) Mengatur penataan investasi, pinjaman daerah, obligasi daerah dan sumber pembiayaan daerah lainnya dan memberikan pendampingan manajemen keuangan BLUD;
 - 11) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan pekerjaan staf bawahan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan;
 - 12) Guna mengunggulkan kedisiplinan, meningkatkan motivasi dan prestasi kerja, dan untuk pertumbuhan karir, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada staf dan menilai kinerja dan perilaku mereka;
 - 13) Melaksanakan tanggung jawab tambahan yang disajikan oleh bupati sejalan dengan fungsi serta tanggung jawabnya.
 - 14) Menyuarakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil evaluasi, rekomendasi, dan peninjauan terkait peran dan fungsinya.

b. Sekretariat

- 1) Membuat rancangan program, aktivitas, dan anggaran sekretariat sejalan sesuai rancangan kerja Badan untuk memandu jalannya tugas; menerapkan manajemen dan *servis* administrasi umum;
- 2) Menerapkan manajemen administrasi kepegawaian;
- 3) Menerapkan manajemen administrasi keuangan ;
- 4) Menerapkan manajemen administrasi perlengkapan;
- 5) Menerapkan manajemen urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- 6) Menerapkan sinkronisasi perancangan program, aktivitas dan anggaran di lingkungan Badan;
- 7) Menerapkan sinkronisasi pengurusan tugas-tugas bidang;
- 8) Menerapkan manajemen kearsipan dan perpustakaan badan;
- 9) Menerapkan pemantauan dan evaluasi organisasi serta operasional;
- 10) Menerapkan pengadaan hubungan kerja di aspek administrasi dengan perangkat daerah sehubungan;
- 11) Menerapkan dan menyelaraskan ganti rugi, upaya kelanjutan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), persiapan bahan, perancangan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas, dan surat menyurat;
- 12) Menyinkronkan perancangan indikator kinerja utama (IKU) badan;
- 13) Menyinkronkan perancangan indikator kinerja individu (IKI);

- 14) Menyinkronkan perancangan Perencanaan Strategis (Renstra) badan;
- 15) Menyinkronkan perancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional badan;
- 16) Menyinkronkan perancangan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja badan/Individu;
- 17) Menyinkronkan perancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan dan individu;
- 18) Menyinkronkan dan memberikan fasilitas pengisian Blanko LHKPN dan LP2P di lingkungan Badan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 19) Menyinkronkan, menuntun dan mengorganisir perancangan LKPI Bupati dan LPPD tiap tutup tahun;
- 20) Menyinkronkan, menuntun dan mengorganisir perancangan LKPD tiap tutup tahun;
- 21) Guna mengunggulkan kedisiplinan, meningkatkan motivasi dan prestasi karir, dan untuk pertumbuhan karir, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai dan menilai kinerja dan perilaku mereka;
- 22) Melakukan tugas tambahan yang disajikan oleh kepala badan sejalan dengan fungsi dan tanggung jawabnya; dan menyuarakan kepada atasan tentang hasil penerapan tugas atau aktivitas.

c. Bidang Anggaran

- 1) Menata program, aktivitas, dan anggaran Bidang Anggaran sehubungan rancangan kerja badan;
- 2) Melakukan penyusunan perencanaan program kerja Bidang Anggaran sebagai patokan penerapan kewajiban setiap peran;
- 3) Melakukan koordinasi perancangan prosedur teknis mengenai penataan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 4) Menyinkronkan penataan dan pengkajian RKA SKPD, rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan untuk persiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD dan kumpulan berbagai varian bahan penataan *feedback* eksekutif dalam rangka penataan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 6) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, menyusun anggaran kas SKPD serta SKPKD, dan menyiapkan dokumen untuk persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA;
- 7) Melakukan arahan persiapan informasi keuangan daerah dilakukan dalam rangka perancangan Peraturan Daerah APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati mengenai ekspansi APBD/Perubahan APBD;
- 8) Menjalankan kegiatan membina manajemen keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bagian dari perencanaan anggaran;

- 9) Menyinkronkan pendampingan, pengawasan dan evaluasi anggaran SKPD;
- 10) Menyinkronkan opini Belanja Tidak Langsung Hibah dan Bantuan;
- 11) Melakukan evaluasi serta melakukan penyempurnaan *output* kerja pegawai serta menyuguhkan instruksi dan panduan pengoperasian pekerjaan oleh pegawai;
- 12) Memasang tanda tangan atau memberikan revisi naskah dinas sehubungan pada kewenangan, tugas, dan fungsinya;
- 13) Guna mengunggulkan kedisiplinan, meningkatkan motivasi dan prestasi kerja, dan untuk pertumbuhan karir, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai bawahan dan menilai kinerja dan perilaku mereka;
- 14) Menerapkan tugas kedinasan lain yang disiapkan oleh Kepala Badan sehubungan tugas dan fungsinya; dan
- 15) Membuat dan menginformasikan laporan hasil penerapan tugas/aktivitas kepada pemimpin.

d. Bidang Pengelolaan

- 1) Merancang rencana program, aktivitas dan anggaran sehubungan rancangan kerja Badan;
- 2) Mengatur manajemen uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah, menerima serta mengawasi uang yang diterima, menyimpan dan membayar beban rekening, dan menjamin bahwa uang yang diterima dan dikeluarkan diverifikasi;

- 3) Melakukan arahan dan pengawasan dalam hal tindakan memproses, penerbitan dan penyebaran SP2D;
- 4) Mengawasi proses verifikasi, memberikan spesifikasi pemakaian untuk legalisasi SPJ gaji dan non gaji, menjalankan validasi, serta publikasi SKPP;
- 5) Melakukan koordinasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan menjalankan pengambilan, pemotongan, dan penyetoran PFK;
- 6) Menyinkronkan penataan laporan eksekusi penerimaan dan pengeluaran dana transfer ke pusat;
- 7) Melakukan koordinasi manajemen piutang dan utang daerah, penerapan analisis pemberdayaan, dan penempatan uang daerah melewati investasi jangka pendek;
- 8) Menyinkronkan penyatuan data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi yang berkaitan;
- 9) Merancang panduan teknis administrasi keuangan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- 10) Mengaudit dan memperbaiki evaluasi kinerja bawahan serta menyajikan instruksi dan panduan penerapan pekerjaan staf naungan;
- 11) Menjalankan pendampingan dan pemantauan, serta pengevaluasian kinerja dan perilaku kepada bawahan sejalan dengan pedoman

guna mengunggulkan kedisiplinan, motivasi dan prestasi kerja dan pertumbuhan karir;

12) Menjalankan tugas kedinasan lain yang disediakan oleh Kepala Badan sejalan dengan tugas dan fungsinya; serta

13) Menginformasikan hasil penerapan tugas/aktivitas pada pimpinan.

e. Bidang Akuntansi

1) Merancang strategi program, aktivitas dan anggaran Bidang Akuntansi sejalan dengan rancangan kerja Badan;

2) Menggagas gagasan kebijakan teknis tentang Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

3) Merancang peraturan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;

4) Menyinkronkan, memandu, mengatur dan memantau pengoperasian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

5) Menyinkronkan dan memantau penerapan perancangan pertanggungjawaban penerapan APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

6) Menyinkronkan dan memandu perancangan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

7) Menyinkronkan pendampingan sebagai bagian pelaporan BLUD dan manajemen non Kas Daerah lainnya;

- 8) Menyinkronkan perancangan *feedback* eksekutif sebagai bagian pertanggungjawaban penerapan APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 9) Memandu, memantau dan mengatur pemaparan informasi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 10) Menyinkronkan penerapan penyatuan *outcome* dan belanja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada berbagai unit SKPD;
- 11) Menyinkronkan penerapan integrasi laporan keuangan entitas akuntansi dan efektivitas pelaporan;
- 12) Menyinkronkan dan memantau penataan laporan realisasi anggaran *outcome* dan belanja daerah secara berkala;
- 13) Menyinkronkan penerapan validasi dan pengevaluasian atas Bukti Memorial;
- 14) Menyetujui dengan bertanda tangan atau paraf revisi pada naskah dinas sejalan dengan kewajiban serta tugas dan fungsinya;
- 15) Menerapkan pendampingan dan pemantauan, serta evaluasi kinerja dan perilaku kepada staf naungan sejalan dengan pedoman guna mengunggulkan kedisiplinan, motivasi dan prestasi kerja serta pertumbuhan karir;
- 16) Menjalankan tugas kedinasan yang disediakan oleh Kepala Badan sejalan dengan tugas dan fungsinya; serta
- 17) Menginformasikan hasil penerapan tugas/aktivitas pada pemimpin.

f. Bidang Aset

- 1) Merancang rencana program, aktivitas dan anggaran Bidang Aset sejalan dengan rencana kerja Badan;
- 2) memformulasikan kebijakan, program, dan panduan penerapan guna manajemen aset daerah, termasuk tatakelola, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, dan TP-TGR.;
- 3) Mengawasi pengelolaan dan akuntansi aset daerah serta memberikan izin untuk digunakan sejalan sesuai peraturan perundangan yang beroperasi;
- 4) Menyinkronkan penerapan pendampingan dan evaluasi penyelenggaraan manajemen aset daerah;
- 5) Membimbing pengawasan penerapan program dan administrasi manajemen aset milik daerah;
- 6) Membimbing pengoleksian bahan koordinasi, pendampingan dan panduan pengoperasian di sektor manajemen aset milik daerah;
- 7) Menjalankan peninjauan dan membenahi pekerjaan bawahan, dan menyampaikan tuntunan dan pedoman mengenai cara mengoperasikan pekerjaan.;
- 8) Guna mengunggulkan kedisiplinan, mengunggulkan motivasi dan prestasi kinerja, dan untuk pertumbuhan karir, menyuguhkan pendampingan dan pemantauan kepada staf dan mengevaluasi kinerja dan perilaku staf;

- 9) Menjalankan tugas kedinasan lain yang telah disediakan oleh Kepala Badan sejalan dengan tugas dan fungsinya; serta
- 10) Menginformasikan hasil penerapan tugas/aktivitas pada pemimpin.

4.2 Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD Pada BPKAD Banyuwangi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah guna menggunakan teknologi informasi untuk mengunggulkan efisiensi, efektivitas administrasi pemerintah, dan meraih target yang dituju. Sebelum adanya SIPD RI, proses pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terdahulu mempunyai sistem yang telah dioperasikan yakni Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting And Asset Application (BIPA4). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) ialah sebuah inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dikendalikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mulai beroperasi sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah yang lain. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan.

Dalam penelitian peneliti mengoperasikan evaluasi pada peralihan Sistem Informasi Akuntansi BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi, yakni dengan menyelaraskan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi,

dengan memanfaatkan Konsep Model Evaluasi Stufflebeam (2003). Konsep model evaluasi kali ini mempunyai sasaran krusial: evaluasi untuk memperbaiki daripada menyajikan bukti. Pembagian aspek penilaian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Model Context, Input, Process, dan Product (CIPP) Stufflebeam dapat ditemukan di sini.

4.2.1 Evaluasi Konteks

1. Konteks Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi Pada Pemanfaatan SIPD.

Mengacu pada tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yakni menjalankan fungsi pendukung perkara pemerintahan di aspek keuangan yang berada di bawah kewenangan daerah dan disuguhkan kepada kabupaten sebagai tugas pembantuan dan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang wajib ditata setiap tahun anggaran tepat waktu sejalan dengan panduan peraturan. Dalam menyusun laporan keuangan daerah BPKAD dibantu dengan sistem yaitu sistem yang digunakan BPKAD Kabupaten Banyuwangi adalah BIPA4 dan SIPD RI. Penggunaan SIPD RI pada Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya sebatas modul penganggaran saja. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis pada SIPD RI, sehingga tidak memungkinkan melanjutkan proses penatausahaan dan akuntansi (pertanggungjawaban) pada SIPD RI. Berkenaan dengan hal tersebut Pemkab Banyuwangi

menggunakan BIPA4 sebagai sistem alternatif untuk melanjutkan proses penatausahaan keuangan daerah sampai ke proses pertanggungjawaban.

2. Kendala dan Tantangan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Banyuwangi sehubungan dengan penggunaan SIPD RI.

Penerapan tugas dan tanggung jawab BPKAD Kabupaten Banyuwangi dalam pemakaian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengalami terjadinya kendala teknis dalam pengimplementasiannya sistem tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Banyuwangi adalah modul penatausahaan pada SIPD RI (tahun 2020 s.d 2023) yang tidak *fleksibel* pada saat melakukan pergeseran anggaran di tengah tahun berjalan, padahal sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI huruf B dikatakan pergeseran anggaran bisa dilakukan pada saat tahun berjalan, tetapi SIPD RI masih belum *support* untuk melakukan pergeseran anggaran. Sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2023 Pemkab Banyuwangi tidak menggunakan SIPD RI sebagai sistem utama dalam penatausahaan maupun pertanggungjawaban keuangan daerah.

Hal itu didukung dengan pernyataan dari Tanjung Shinta Yudaningsyah salah satu staff di bidang Akuntansi pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 15.00:

“Proses pengelolaan keuangan daerah itu ada beberapa tahapan dan modul, yang pertama itu ada penganggaran, kedua ada Penatausahaan, dan yang ketiga Akuntansi (pertanggungjawaban). Saat ini yang baru saja selesai input data hanya bagian penganggaran saja,

untuk penatausahaan kita baru saja memulai dan untuk akuntansi masih belum dan kita tidak tahu kapan karena kita juga bagian akuntansi masih belum dapat akses untuk menggunakan SIPD RI jadi sementara kita masih menggunakan BIPA4. Saya juga tidak bisa menunjukkan modul mana saja yang digunakan karena kita belum diberi akses untuk masuk ke SIPD RI kita hanya diberi gambaran saja saat sosialisasi SIPD RI dilakukan.”

3. Rencana Serta Tujuan Implementasi SIPD RI yang Lebih Optimal.

Sasaran prioritas pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yakni guna meringankan pengadministrasian keuangan utamanya guna tujuan keterbukaan. Pada dasarnya Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai pengelola keuangan, dalam hal ini pengaplikasian/pengoprasian SIPD RI pada pengelolaan keuangan daerah. Dan perlu diketahui SIPD RI merupakan sistem yang berasal dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga untuk proses memperbarui ataupun pemeliharaan SIPD RI merupakan kewenangan Kemendagri. Untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 proses peralihan sistem tidak berjalan maksimal dikarenakan terdapat beberapa permasalahan baik teknis maupun non teknis. Untuk tahun 2024 masih bersifat wait and see karena modul dan tahapan pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya ada di SIPD RI seperti modul akuntansi yang belum ada pada SIPD RI.

4.2.2 Evaluasi Input

1. Menilai dan Identifikasi Kemampuan Sistem Informasi Akuntansi.

Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ialah sebuah aplikasi yang bermanfaat terhadap pemerintah daerah yakni pada manajemen keuangan

daerah. Namun pada BPKAD Kabupaten Banyuwangi masih belum sepenuhnya dapat merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi SIPD. Pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya mampu memanfaatkan SIPD RI untuk modul penganggaran. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai hambatan teknis yang terkait dengan SIPD RI, sehingga menghambat kelanjutan proses penatausahaan dan akuntansi di lingkup tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi tetap menggunakan BIPA4 sebagai solusi alternatif guna melanjutkan proses penatausahaan keuangan daerah hingga tahap pertanggungjawaban. BIPA4 dan SIPD RI mempunyai keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri, sehingga dapat dikatakan kedua sistem tersebut dapat menunjang dan mempermudah tahapan manajemen keuangan daerah berawal dari fase perancangan, penganggaran, tatakelola, dan pertanggungjawaban.

Terdapat beberapa faktor dalam tinjauan data masukan di dalam Stufflebeam untuk mencapai tujuan program adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pendukung, dana dan anggaran.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia dalam implementasi aplikasi SIPD di BPKAD Kabupaten Banyuwangi sudah paham secara keseluruhan dan piawai di dalam penggunaan SIPD, hal tersebut dapat dilihat dari kendala yang dihadapi adalah dari sistem tersebut yang mengalami kendala eror bukan dari SDM yang ada di BPKAD Kabupaten Banyuwangi.

Hal tersebut didukung pernyataan dari Bapak Andika selaku pegawai bagian anggaran BPKAD Banyuwangi pada wawancara tanggal 12 Februari 2024 pukul 15.37:

“Salah satu contoh kendala adalah modul penatausahaan pada SIPD RI (tahun 2020 s.d 2023) yang tidak fleksibel pada saat melakukan pergeseran anggaran ditengah tahun berjalan, padahal sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI huruf B dikatakan pergeseran anggaran bisa dilakukan pada saat tahun berjalan, tetapi SIPD RI masih belum suport untuk melakukan pergeseran anggaran. Sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2023 Pemkab Banyuwangi tidak menggunakan SIPD RI sebagai sistem utama dalam penatausahaan maupun pertanggungjawaban keuangan daerah.”

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai menjadi hal penting dalam menjalankan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Fasilitas dan infrastruktur juga berperan signifikan dalam menunjang kinerja dan kewajiban moral para staf atau sumber daya manusia, karena akses yang mudah melalui sarana dan prasarana memungkinkan mereka untuk dengan lancar menggunakan SIPD dalam tugas mereka. Dengan sederhananya SIPD dijangkau, maka berdampak pada data hasil dan pengaduan keuangan yang sesuai target dan tepat. Terlihat bahwa sarana dan prasarana yang terdapat di BPKAD Kabupaten Banyuwangi cukup dan memadai untuk digunakan dalam pengoperasian SIPD.

Pada Bidang Anggaran dan Akuntansi di BPKAD sudah semua pegawai menggunakan komputer untuk mengoperasikan SIPD.

c. Dana dan Anggaran

Untuk perencanaan, keuangan, dan pelaporan pemerintah daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bisa membantu meminimalkan pemanfaatan anggaran pemerintah daerah. Dengan adanya SIPD, daerah tidak wajib mengalokasikan dana guna membangun aplikasi atau sistem perencanaan dan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun anggaran 2024 SKPD keseluruhan pada Pemkab Banyuwangi telah berkomitmen untuk menggunakan SIPD sebagai sistem utama.

d. Observasi

Berdasarkan investigasi yang dijalankan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi. Proses peralihan sistem yang berawal BIPA4 ke SIPD RI sudah dilakukan sejak awal SIPD RI diluncurkan pada tahun 2019, tetapi proses mutasi selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan proses penatausahaan dan pertanggungjawaban pada SIPD RI. Untuk tahun anggaran 2024 pada dasarnya Pemkab Banyuwangi berkomitmen menggunakan SIPD RI sebagai sistem utama, tetapi

sama halnya dengan tahun sebelumnya dengan menggunakan dua sistem (SIPD RI dan BIPA4) sebagai backup ketika SIPD RI mengalami kendala di tengah tahun berjalan.

4.2.3 Evaluasi Proses

1. Proses Peralihan Sistem Informasi Akuntansi ke SIPD RI

Proses transisi modul akuntansi dari sistem BIPA4 ke SIPD RI di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih terkendala karena sejak tahun 2020 hingga 2023 terdapat beberapa hambatan teknis yang menghambat peralihan tersebut. Kondisi ini membuat tidak memungkinkan bagi modul akuntansi untuk beralih secara efektif dari BIPA4 ke SIPD RI. Sementara itu, di tahun anggaran 2024, keputusan terkait transisi masih dalam tahap menunggu karena modul akuntansi yang akan digunakan dalam SIPD RI belum muncul. Situasi ini mengakibatkan Pemkab Banyuwangi mengambil pendekatan menunggu dan mengamati sebelum melakukan langkah lebih lanjut terkait migrasi modul akuntansi ke dalam SIPD RI. Hal tersebut dilakukan guna memastikan kelancaran proses transisi serta meminimalisir potensi kendala yang mungkin timbul saat penggunaan modul akuntansi SIPD RI mulai diterapkan. Penggunaan SIPD RI pada Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya sebatas modul penganggaran saja. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis pada SIPD RI, sehingga tidak memungkinkan melanjutkan proses penatausahaan dan akuntansi (pertanggungjawaban) pada SIPD RI. Berkenaan dengan hal tersebut Pemkab Banyuwangi

menggunakan BIPA4 sebagai sistem alternatif untuk melanjutkan proses penatausahaan keuangan daerah sampai ke proses pertanggungjawaban. Proses transisi dari menggunakan sistem BIPA4 ke SIPD RI telah dimulai sejak peluncuran SIPD RI pada tahun 2019. Namun, sepanjang tahun anggaran 2020 hingga 2023, proses transisi ini tidak berjalan dengan optimal karena menghadapi berbagai kendala teknis. Hal ini mengakibatkan proses peralihan sistem tidak mungkin untuk dilanjutkan proses pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan pada SIPD RI. Menyongsong tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap berkomitmen untuk menggunakan SIPD RI sebagai sistem utama.

2. Kendala yang Dihadapi Selama Proses Peralihan Sistem Informasi Akuntansi dari BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Banyuwangi.

Siklus manajemen keuangan, dari perancangan dan penganggaran hingga akuntansi dan pengaduan keuangan, dapat digabungkan dengan SPID RI, aplikasi berbasis web yang luar biasa. Bahkan SIPD RI dapat mengawasi manajemen keuangan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Ini memungkinkan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk memantau manajemen keuangan daerah di naungannya secara langsung dan terkini. Terlepas dari paradigma dan target yang tepat itu, saat penerapan di lapangan sejak tahun 2020, sering dijumpai sebagian permasalahan dan tantangan sehingga SIPD RI masih belum bisa digunakan sepenuhnya.

Kendala yang dihadapi adalah modul penatausahaan pada SIPD RI (tahun 2020 s.d 2023) yang tidak *fleksibel* pada saat melakukan pergeseran

anggaran ditengah tahun berjalan, padahal sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 mengenai Panduan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI huruf B dikatakan pergeseran anggaran bisa dilakukan pada saat tahun berjalan, tetapi SIPD RI masih belum *support* untuk melakukan pergeseran anggaran. Sehingga pada tahun 2020 sampai dengan 2023 Pemkab Banyuwangi tidak menggunakan SIPD RI sebagai sistem utama dalam penatausahaan maupun pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 proses peralihan sistem tidak berjalan maksimal. Pada tahun 2024 ini kendala yang dialami ada pada SIPD RI itu sendiri seperti belum semua modul dapat digunakan dan terdapat beberapa sistem yang masih eror di SIPD RI hal tersebut membuat terhambatnya proses pengelolaan keuangan daerah pada SIPD RI yang pada saat ini hanya penganggaran saja yang sudah melakukan perpindahan data dari BIPA4 ke SIPD RI untuk penatausahaan BPKAD Kabupaten Banyuwangi baru memulai perpindahan data hal ini akan terus berlanjut sehingga proses pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya menggunakan SIPD RI. Peralihan dari BIPA4 ke SIPD RI tidak ada kendala pada sumber daya manusia di setiap SKPD di Banyuwangi karena telah familiar dengan transformasi dan temuan baru yang dilakukan daerah, maka tahapan adaptasi dapat dilakukan dengan lebih efisien.

4.2.4 Evaluasi Produk

SIPD RI yakni temuan baru yang dideklarasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diregulasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019. Peraturan ini mulai beroperasi sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang menyertakan informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta laporan pemerintah daerah yang lain. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan. Hal tersebut yang mendasari Pemkab Banyuwangi menggunakan SIPD RI pada sistem keuangan daerah. Segala permasalahan dan sesuatu hal yang menghambat masih sering terjadi pada pemanfaatan SIPD RI terutama dalam manajemen keuangan yang wajib dilakukannya transformasi atau temuan inovasi yang signifikan guna mengembangkan keefektifan pengelolaan keuangan. Hal yang diharapkan pada SIPD RI untuk kedepannya adalah :

1. Jika terdapat modul baru pada SIPD RI diharapkan sosialisasi yang bersifat teknis (*trial and error*) kepada pengguna dalam hal ini Pemerintah Daerah, sehingga meminimalisir kesalahan.
2. Modul – modul yang ada pada SIPD RI mulai dari Perancangan, Penganggaran, Penatausahaan sampai dengan Pertanggungjawaban diharapkan dapat berjalan dengan baik, dengan prioritas pada report.
3. Pada modul penatausahaan diharapkan dapat melakukan pergeseran anggaran di tengah tahun berjalan.
4. Diharapkan SIPD RI dapat terintegrasi terhadap sistem keuangan yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat lainnya pada aspek Kementerian Keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Beralaskan uraian tafsiran yang sudah dikaji bisa diderivasikan bahwasanya proses peralihan sistem informasi akuntansi BIPA 4 ke SIPD RI untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 tidak berjalan maksimal. Untuk tahun 2024 masih bersifat *wait and see* karena masih terdapat kendala teknis dalam proses peralihan sistmen, seperti modul penatausahaan pada SIPD RI (tahun 2020 s.d 2023) yang tidak *fleksibel* pada saat melakukan pergeseran anggaran ditengah tahun berjalan, padahal sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI huruf B dikatakan pergeseran anggaran bisa dilakukan pada saat tahun berjalan, tetapi SIPD RI masih belum *support* untuk melakukan pergeseran anggaran. Hal tersebut menyebabkan BPKAD tetap akan menggunakan BIPA4 sebagai aplikasi pembantu atau aplikasi alternatif apabila di tengah tahun berjalan SIPD RI mengalami kendala teknis dan masih belum sepenuhnya mendapat akses SIPD RI tetapi proses pengelolaan dapat tetap berjalan dengan adanya dua sistem yang dijalankan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Saat ini hanya penganggaran saja yang sudah melakukan perpindahan data dari BIPA4 ke SIPD RI untuk penatausahaan BPKAD Kabupaten Banyuwangi baru memulai perpindahan data hal ini akan terus berlanjut sehingga proses pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya menggunakan SIPD RI. Peralihan dari BIPA4 ke SIPD RI tidak ada kendala pada sumber daya manusia di setiap SKPD

di Banyuwangi karena sudah familiar dengan transformasi dan temuan baru yang dioperasikan daerah, maka tahapan adaptasi dapat dilakukan dengan lebih efisien.

5.2 Saran

Beralaskan temuan riset yang selesai dijalankan, peneliti menganjurkan beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Apabila terdapat modul baru pada SIPD RI, disarankan untuk dilakukan sosialisasi teknis kepada pengguna, khususnya Pemerintah Daerah, yang bersifat uji coba (trial and error). Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat pengguna mulai menggunakan modul baru tersebut.
- b. Diperlukan upaya pengoptimalan modul – modul pada SIPD RI mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pertanggung jawaban untuk memastikan kelancaran fungsi, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan. Hal ini bertujuan supaya sistem informasi keuangan daerah dapat beroperasi dengan baik dan terorganisir serta memberikan laporan yang akurat dan terpercaya. Pada modul penatausahaan bisa melakukan pergeseran anggaran di tengah tahun berjalan.
- c. Diharapkan SIPD RI dapat terintegrasi terhadap sistem keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat lainnya pada aspek ini Kementerian Keuangan. Penting untuk menyatukan SIPD RI dengan sistem keuangan yang dikelola oleh instansi Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Keuangan, guna mencapai integrasi yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al – Quran al – Karim dan terjemahan
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press 2021.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basir, A. (1996). *kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan*.
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). *Confiança Pública no Governo Local: Explicando o Papel das Boas Práticas de Governança*. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350.
- Budi, E. S., Rekayasa, T., Pemerintahan, I., Skripsi, P., & Kawuryan, M. W. (2022). -*Muh.Eko Setia Budi-30.1206-Evaluasi Kualitas Penerapan Aplikasi Sipd Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto*. 1–13.
- bpkad. (2023, August 17). Dashboard BIPA4. Retrieved from BIPA 4: <https://BIPA4.banyuwangikab.go.id/>
- bpkad. (203, December 20). Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Retrieved from BPKAD BANYUWANGI: <https://bpkad.banyuwangikab.go.id/>
- Collier, P., Dixon, R. (1995). The evaluation and audit of management information systems. *Managerial Auditing Journal*, 10(7).
- Fitrios, R. (2019). Factors That Influence Accounting Information System Implementation And Accounting Information Quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 5, 192–198.
- Ghaffar, A. A. (2016). Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dengan Model Cipp Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. *JKP (Jurnal Keuangan Publik)*, 20, 1–23.
- Gofwan, H. (2022). Effect of Accounting Information System on Financial Performance of Firms: A Review of Literature Effect of Accounting Information System on Financial Performance of Firms: A Review of Related Literatures. *Journal of Acccounting Thoughts: A Methodological Approach*, 2(1), 57–60.
- James A Hall. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 4. Terjemahan Dewi Fitriyani*. Salemba 4.
- LAILIYYAH, Z. (2023). *Evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada mi roudlotul islamiyah sawocangkring wonoayu sidoarjo*.

Laudon. (2000). *Management Information Systems, organization and Technology in The Networked Enterprise* (Sixth edit). Prentice-Hall.

Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi. Buku 2. Edisi ke-9/ terjemahan Dewi Fitriyani* (Edisi Semb). Salemba 4.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lampiran :

1. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : fe.uin-malang.ac.id Email : fe@uin-malang.ac.id

Nomor : B-0241/F.Ek.1/PP.00.9/02/2024

5 Februari 2024

Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Yth. Cahyanto Hendri W, SE Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kab. Banyuwangi

JL. Adi Sucipto No. 28 Banyuwangi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Aldhi Taufikurrahman

NIM : 200502110087

Program Studi : Akuntansi

Semester : VIII (Delapan)

Contact Person : 081919026374

Judul Penelitian : Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi BIPAA ke SIPD

Dosen Pembimbing : Zuraidah, M.S.A

Waktu Pelaksanaan : 31 Januari 2024 s.d 29 Februari 2024

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siswanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Arsip.



2. Draft Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana proses peralihan sistem informasi akuntansi dari BIPA4 ke SIPD RI dilakukan di BPKAD Kabupaten Banyuwangi?
- b. Apa alasan utama dibalik keputusan untuk melakukan peralihan sistem informasi akuntansi dari BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi?
- c. Bagaimana rencana implementasi peralihan sistem informasi akuntansi dari BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi dilakukan? Apakah ada tahapan khusus yang direncanakan?
- d. Bagaimana peran stakeholder internal (pegawai BPKAD) dalam proses peralihan sistem informasi akuntansi dari BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana reaksi dan respon mereka terhadap perubahan tersebut?
- e. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses peralihan sistem informasi akuntansi dari BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana strategi dan tindakan yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut?
- f. Bagaimana evaluasi hasil dan dampak dari peralihan sistem informasi akuntansi dari BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi? Apakah tujuan yang diharapkan tercapai? Apakah ada manfaat yang dirasakan setelah peralihan dilakukan?
- g. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna (pegawai BPKAD) terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi SIPD RI setelah peralihan? Apakah mereka merasa sistem baru lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan sistem sebelumnya (BIPA4)?
- h. Bagaimana keberlanjutan dan pemeliharaan sistem informasi akuntansi SIPD RI setelah peralihan di BPKAD Kabupaten Banyuwangi? Apakah ada rencana untuk terus memperbarui dan mengoptimalkan sistem ini di masa depan?
- i. Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari proses peralihan sistem informasi akuntansi dari BIPA4 ke SIPD RI di BPKAD Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana meningkatkan efektivitas dan penggunaan sistem informasi akuntansi di masa mendatang?

3. Dokumentasi Penelitian



4. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

18/06/24, 08.11 Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Aldhi Taufikurrahman
NIM : 200502110087
Konsentrasi : Sistem Informasi Akuntansi
Judul Skripsi : **Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	22%	11%	11%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juni 2024
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

<https://access.fe.uin-malang.ac.id/print/plagiasi/17558/1513> 1/1

5. Bukti Konsultasi

19/06/24, 19:28

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110087
Nama : Muhammad Aldhi Taufikurrahman
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Zuraidah, M.S.A
Judul Skripsi : Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	9 November 2023	Pengajuan judul proposal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	28 November 2023	Persetujuan judul sekaligus bimbingan	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	30 November 2023	Konsultasi mengenai proposal dan revisi	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	1 Desember 2023	Konsultasi hasil revisi proposal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	6 Desember 2023	Konsultasi hasil revisi proposal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	7 Desember 2023	Bimbingan terakhir proposal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	18 Desember 2023	ACC Proposal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	3 Januari 2024	Bimbingan mengenai Bab IV - V	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	16 Januari 2024	Bimbingan terkait program afirmasi dan penyusunan jurnal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	13 Mei 2024	Melakukan submit jurnal bersama dosen pembimbing	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
11	18 Juni 2024	Penyerahan hasil skripsi akhir	Genap	Sudah

<https://access.fe.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/1200>

1/2

Malang, 18 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Zuraidah, M.S.A